

**PROSES PENANGANAN PERKARA PEMBUNUHAN BAYI OLEH  
IBU KANDUNG DI KOTA SURAKARTA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
Jurusan Hukum

Oleh :

**DETAMI PRADIKSA**

C. 100.130.043

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROSES PENANGANAN PERKARA PEMBUNUHAN BAYI OLEH  
IBU KANDUNG DI KOTA SURAKARTA**

**NASKAH PUBLIKASI**

Yang ditulis oleh :

**DETAMI PRADIKSA**

**C 100 130 043**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PROSES PENANGANAN PERKARA PEMBUNUHAN BAYI OLEH  
IBU KANDUNG DI KOTA SURAKARTA**

Yang ditulis oleh :

**DETAMI PRADIKSA**

**C 100 130 043**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 8 Februari 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.  
Anggota : Kuswardani, S.H., M.Hum.

()  
()  
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

( ()  
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 01 Februari 2017

Penulis



**DETAMI PRADIKSA**  
C100130043

## PROSES PENANGANAN PERKARA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG DI KOTA SURAKARTA

### ABSTRAK

Saat ini banyak ditemukan kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Pembunuhan bayi ini mensyaratkan bayi tersebut di bunuh beberapa saat setelah dilahirkan. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka tidak dapat disebut pembunuhan bayi oleh ibu kandung namun termasuk pembunuhan biasa atau aborsi. Pembunuhan bayi oleh ibu kandung di bagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu berencana dan tidak berencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris berupa mengumpulkan kemudian meneliti data sekunder dilanjutkan dengan meneliti data primer yang di peroleh dari lapangan. Untuk menguatkan unsur – unsur Pasal yang didakwakan berdasarkan dari olah TKP, hasil Visum et Repertum dan keterangan saksi - saksi. Aparat Penegak Hukum dalam memproses perkara pembunuhan bayi oleh ibu kandung memiliki hambatan berkaitan dengan saksi dan pelaku.

Kata kunci: pembunuhan bayi, ibu kandung, aparat penegak hukum

### ABSTRACT

*Currently, many found cases of infanticide committed by his own biological mother. Infanticide requires the baby killed shortly after birth. If the conditions are not fulfilled then it cannot be called infanticide by the biological mother, otherwise it is including ordinary murder or abortion. Infanticide by the biological mother is divided into two (2) type there are planned and not planned. This research using empirical juridical approach by collecting and examining secondary data and then followed by analyzing primary data obtained from the field. To reinforce the elements of Article were indicted based on the crime scene, the results of a post mortem and the testimony of witnesses. Law enforcement authorities in processing the cases of infanticide by the biological mother have a barrier related to witnesses and perpetrators.*

*Keywords: infanticide, biological mother, law enforcement*

## 1. PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak diberitakan kasus pembunuhan bayi, baik di media lokal maupun nasional. *Infanticide* atau pembunuhan anak sendiri adalah suatu bentuk kejahatan yang unik karena pelakunya adalah ibu kandung sendiri dengan alasan malu memiliki anak hasil dari hubungan gelap. Warga Kampung Suronalan RT 006/ RW 008 Kelurahan [Pajang](#), Kecamatan [Laweyan](#), [Solo](#), baru saja digegerkan oleh penemuan mayat bayi. Mayat bayi

laki-laki itu ditemukan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) [Pajang](#), Jl Transito oleh seorang petugas kebersihan. Sampai saat ini pelaku pembunuhan bayi tersebut masih dalam proses pencarian oleh Polresta Surakarta.<sup>1</sup> Kemudian pada tahun 2015 YNT (30 tahun) merupakan seorang guru les privat asal Lawang, Malang, Jawa Timur tega membunuh bayi laki-lakinya setelah dilahirkan dengan memasukkannya ke dalam monoblok kloset di ruang IGD Rumah Sakit (RS) Kustati, Pasar Kliwon. YNT mengaku melakukan perbuatan tersebut karena takut dan malu.<sup>2</sup>

Dalam hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan anak sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan yaitu dari Pasal 341 dan 342 KUHP. Tindak pidana pembunuhan bayi beberapa unsurnya memerlukan pemeriksaan lebih detil untuk dapat menyatakan unsur tindak pidana pembunuhan bayi tersebut terpenuhi, selain itu agar aparat penegak hukum tidak salah dalam menggunakan pasal yang didakwakan serta dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. Hal ini terjadi karena terdapat kemungkinan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana abortus atau tindak pidana pembunuhan biasa.<sup>3</sup>

Dari hasil pemaparan di atas, kemudian penulis menarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan yaitu; (1) Bagaimana peran kepolisian dalam memproses perkara pembunuhan bayi oleh ibu kandung; (2) Bagaimana pertimbangan kejaksan dalam memproses perkara pembunuhan bayi oleh ibu kandung; (3) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembunuhan bayi oleh ibu kandung; dan (4) Apa

<sup>1</sup>Tribunsolo.com, Rabu 13 Juli 2016: *Mayat Bayi Di Tempat Pembuangan Sampah Pajang, Solo, Ini Gegerkan Warga*, dalam <http://solo.tribunnews.com/2016/07/13/mayat-bayi-di-tempat-pembuangan-sampah-pajang-solo-ini-gegerkan-warga>, diunduh 23 September 2016, pukul 17:11 WIB.

<sup>2</sup>Suaramerdeka, Selasa 27 September 2016: *Bayi Dibunuh Lalu Disembunyikan Di Monoblok Kloset*, dalam <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/bayi-dibunuh-lalu-disembunyikan-di-monoblok-kloset/>, diunduh 23 september 2016, pukul 17:15 WIB.

<sup>3</sup>Miske Rizki Aurianti, 2015, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Anak Di Pengadilan Negeri Bantul (Studi Kasus Perkara Nomor 223/PID.B/2014/PN.BTL)*”, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/9069/1/JURNALHK10991.pdf>, diunduh pada 23 september 2016, pukul 17: 11 WIB

yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam memproses pembunuhan bayi oleh ibu kandung.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan aparat penegak hukum dalam memproses perkara pembunuhan bayi oleh ibu kandung, serta untuk mengetahui yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam memproses perkara pembunuhan bayi oleh ibu kandung. Dengan dilakukannya penelitian ini manfaat yang ingin dicapai berupa memberikan pemahaman tentang pertimbangan aparat penegak hukum dalam memproses perkara pembunuhan bayi oleh ibu kandung dan memberikan pemahaman tentang yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam memproses perkara pembunuhan bayi oleh ibu kandung.

Pada penelitian ini adalah jenis penelitian *deskriptif*, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>4</sup> Kemudian pendekatan *yuridis empiris* dipilih sebagai metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.<sup>5</sup> Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Yang dimaksud dengan pembunuhan oleh ibunya sendiri dari seorang anak pada waktu atau tidak lama setelah dilahirkan dan yang di

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 25.

<sup>5</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53.

dorong oleh ketakutan si ibu akan diketahui, bahwa ia telah melahirkan anak, adalah sebagai berikut:

1. Yang dihukum disini ialah seorang ibu, baik sudah kawin maupun belum kawin, yang dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dahulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau selang beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan oleh orang lain, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan “makar mati anak” atau “membunuh biasa anak” (*kinderdoodslag*).
2. Syarat terpenting dari pembunuhan dalam Pasal tersebut, bahwa pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibu kandungnya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu oleh orang lain. Biasanya anak tersebut adalah anak yang di dapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak syah. Apabila syarat ini tidak ada, maka perbuatan itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa tersebut pasal 338 atau 340.
3. Peristiwa atau perbuatan membuang bayi, jika dapat dibuktikan bahwa bayi itu waktu dilahirkan sudah dalam keadaan mati, maka tidak dikenakan pasal ini, akan tetapi dikenakan Pasal 181.<sup>6</sup>

Motif takut diketahui melahirkan bayi itu berakar pada sifat tercelanya peristiwa kelahiran itu. Karena kelahiran tersebut tidak dikehendaki oleh si ibu yang merupakan hasil dari hubungan gelap dengan laki-laki di luar perkawinan yang sah. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang memalukan dan suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap perempuan. Asalkan motif takut diketahui bahwa ia melahirkan sudah ada, alasan yang menjadi penyebab takutnya itu tidaklah merupakan hal yang begitu penting.<sup>7</sup>

Perbuatan yang diancam dalam Pasal 342 wujudnya sama dengan yang diancam pada Pasal 341, hanya saja pada Pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak, yang ditentukan sebelum anak

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hal. 242.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo, hal 88.



dilahirkan. Tindakan ini dinamakan “pembunuhan anak berancang” (*kindermoord*).<sup>8</sup> Rumusan delik pada Pasal 341 mengacu pada Pasal 338 sedangkan Pasal 342 rumusan delik mengacu pada Pasal 340, hanya saja terdapat bagian inti yang ditambah “karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat akan melahirkan” yang membedakan yaitu dalam Pasal 342 dilakukan dalam keadaan yang tidak tenang karena takut ketahuan melahirkan.<sup>9</sup>

### 3.1 Peran kepolisian

Di Surakarta sendiri kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung selama tahun 2014 hingga sekarang terdapat 1 (satu) kasus. Pada kasus penemuan mayat bayi oleh ibu kandung, barang bukti berupa mayat bayi yang di ambil dari TKP oleh kepolisian diserahkan ke bagian Kedokteran Forensik Rumah Sakit terdekat dengan dilampiri permohonan Visum et Repertum. Disampaikan oleh Ipda Wahyu Riyadi<sup>10</sup> bahwa setiap ditemukan mayat bayi kepolisian selalu memohonkan untuk dilakukan Visum et Repertum pada bagian Kedokteran Forensik Rumah Sakit terdekat dengan tujuan akan digunakan sebagai alat bukti jika suatu hari telah ditemukan orangtua dari mayat bayi atau pelaku dari pembunuhan bayi tersebut. Dari hasil Visum et Repertum tersebut dapat diketahui penyebab kematian bayi.

Selain dapat tidaknya dilakukan Penyidikan gelar perkara yang dilakukan oleh seluruh elemen kepolisian juga menentukan Pasal yang akan digunakan untuk menjerat pelaku. Penyidik dalam menjerat kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung ini dapat menggunakan Pasal 80 ayat (3), (4) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 338 KUHP, Pasal 181 KUHP, Pasal 341 KUHP dan atau Pasal 342 KUHP atau jika dimungkinkan dapat juga dimasukkan Pasal lain yang memenuhi unsurnya.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Loc. Cit, hal 75

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 58.

<sup>10</sup> Wahyu Riyadi, Kasubnit II Unit PPA Satreskrim Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Jumat 21 Oktober 2016, Pukul 10.15 WIB.

Untuk membedakan antara pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, pembunuhan bayi dan aborsi, kepolisian melihat motif dari perbuatan itu terlebih dahulu, apakah niat untuk membunuh tersebut muncul ketika bayi masih dalam kandungan atau ketika ia mengetahui telah melahirkan bayi yang ia sendiri tidak tahu kapan bayi itu akan lahir. Akan tetapi Undang – Undang Perlindungan Anak tidak mempermasalahkan apakah perbuatan itu dilakukan dengan rencana atau tidak namun lebih kepada perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau kekejaman yang mengakibatkan mati. Jika dilihat dari mayatnya pada pembunuhan bayi bentuk badan bayi itu telah utuh sedangkan pada aborsi bentuk badannya belum sempurna.

Tugas penyidik adalah membuat berkas serta mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang mana dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melimpahkan berkas ke kejaksan penyidik tanpa melihat apakah perkara itu nanti oleh hakim akan diputus bersalah atau tidak, wewenang kepolisian hanyalah memproses suatu perkara yang itu diadukan.

### 3.2 Pertimbangan Kejaksan

<b>No. Perkara 53/ Pid.B/2015/PN.Skt</b>	<b>No. Perkara 135/ Pid.B/2015/PN.Kbm</b>	<b>No. Perkara 276/ Pid.B/2015/PN.Dps</b>
<b>Terdakwa:</b>  Yanita Pungkasari	<b>Terdakwa:</b>  Tri Murtati	<b>Terdakwa:</b>  Patemah

Pada Nomor Perkara **53/ Pid.B/2015/PN.Skt** Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif ditandai dengan kata “atau” sehingga Hakim dapat memilih Pasal manakah yang sesuai dengan fakta persidangan,<sup>11</sup> sehingga di sini terlihat Penuntut Umum masih ragu – ragu dalam mendakwa Terdakwa. Padahal dari keterangan saksi dan hasil Visum et Repertum serta hasil rekonstruksi seharusnya Penuntut Umum lebih yakin Pasal manakah yang akan digunakan. Kemudian pada

<sup>11</sup> Lihat Hari Sasongko Dan Tjuk Suharjanto, 1988, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hal. 109.

Nomor Perkara **135/Pid.B/2015/PN.Kbm** Penuntut Umum juga menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Di sini Penuntut Umum juga terlihat ragu dalam menggunakan Pasal namun jika dibandingkan dengan perkara yang sebelumnya pada Nomor Perkara ini Pasal yang digunakan lebih sedikit. Pada Nomor Perkara yang terakhir yaitu Nomor Perkara **276/Pid.B/2015/PN.Dps** Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal. Menurut penulis dilihat dari posisi kasusnya terdakwa dapat pula dijerat dengan Pasal 342 KUHP karena terdakwa sebelumnya pernah melahirkan sehingga terdakwa mengetahui bagaimana rasanya sakit perut yang hanya ingin buang air besar dengan akan melahirkan bayi dikuat lagi dengan terdakwa pernah pergi ke bidan dengan anaknya secara otomatis terdakwa mengetahui umur kehamilannya dan kapan kira-kira waktunya ia akan melahirkan dan ketika terdakwa akan ke kamar mandi Terdakwa membawa tas kresek ini menjadi petunjuk bahwa Terdakwa berniat akan membuang bayi itu setelah dilahirkan dengan membungkusnya dengan tas kresek tersebut karena orang pada umumnya tidak mungkin memiliki niat membawa tas kresek ketika akan buang air besar.

Melihat dari uraian 3 (tiga) kasus diatas dan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, penulis melihat Penuntut Umum mengesampingkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP. Dimana tindak pidana pembunuhan bayi ini juga diatur dalam Undang – Undang yang lebih khusus yaitu pada Pasal 80 ayat (3), (4) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis Penuntut Umum dalam mendakwa Terdakwa seharusnya menggunakan aturan yang lebih khusus yaitu Pasal 80 ayat (3), (4) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun dalam surat dakwaan Pasal ini tidak ada yang dicantumkan.

### 3.3 Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim untuk Nomor Perkara **53/Pid.B/2015/PN.Skt** menurut penulis perlu ditinjau kembali, karena dari keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada yang menguatkan bahwa Terdakwa

membunuh bayi tersebut. Dari beberapa keterangan saksi hanya menjelaskan kronologi sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Dari hasil Visum et Repertum sendiri tidak dapat menjelaskan apa penyebab bayi tersebut meninggal. Padahal yang dapat membuktikan penyebab bayi itu meninggal adalah dari hasil Visum et Repertum tersebut. Dari hasil keterangan Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan bahwa ketika bayi tersebut dilahirkan tidak menangis dan ketika dimasukkan ke dalam monoblock toilet bayi tersebut juga tidak menangis bahkan tidak bergerak, maka ini dapat menjadi petunjuk jika bayi tersebut ketika dilahirkan sudah dalam keadaan meninggal sebagaimana dari keterangan Ahli Forensik Dr.dr. Hari Wijoso, MM. Sp.F dalam persidangan menyatakan bahwa “bayi yang mati dalam kandungan bisa keluar kalau ibunya mengeluarkan bayi tersebut dengan cara mengendang dan tidak harus melalui operasi”. Dengan begitu Terdakwa seharusnya tidak dijatuhi hukuman karena memenuhi unsur Pasal 181 KUHP bukan 341 KUHP. Pasal 341 KUHP dapat terpenuhi unsur – unsurnya apabila Hakim dapat lebih jeli lagi dalam memberikan pertanyaan terhadap Terdakwa yaitu apakah Terdakwa saat mengeluarkan bayi tersebut sambil menekan atau memijit perutnya? Karena apabila hal ini dilakukan maka Terdakwa atau ibu bayi berarti telah melakukan pembunuhan terhadap bayinya karena perbuatan menekan atau memijit perut tersebut dapat terjadi di atas tubuh bayi sehingga dapat membunuhnya. Akan tetapi hal ini tidak terungkap dalam persidangan.

Selanjutnya untuk Nomor Perkara **135/Pid.B/2015/PN.Kbm** unsur – unsur dalam Pasal 341 KUHP telah terpenuhi. Pada Nomor Perkara **276/Pid.B/2015/PN.Dps** menurut Penulis dalam perkara ini Hakim kurang memperhatikan petunjuk yang terdapat pada persidangan dan berkas perkara yang menunjukkan terdakwa melakukan pembunuhan bayi sendiri dengan berencana. Bukti petunjuk tidak dapat dikesampingkan dalam hal Terdakwa tidak mengakuinya dan tidak dapat dilihat oleh panca indera maka hanya dapat diterangkan melalui petunjuk-petunjuk.<sup>12</sup> Jadi putusan ini perlu ditinjau

---

<sup>12</sup> Lihat Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hal. 99.

kembali karena dari posisi kasusnya dapat memenuhi unsur dalam Pasal 342 KUHP.

Hakim dalam memutus perkara hanyalah melihat pada surat dakwaan dan alat bukti yang diajukan di persidangan tanpa melihat Pasal manakah yang seharusnya digunakan sehingga dalam pembunuhan bayi ini mengesampingkan UU yang lebih khusus mengaturnya yaitu UU Perlindungan Anak yang mengancam dengan hukuman yang lebih berat. Hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan aturan hukum yang ada dalam arti juga menegakkan hukum. Tidak hanya sesuai dengan hukum namun juga sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

### 3.4 Hambatan

*Pertama*, Saksi memang bukan satu – satunya alat bukti yang mendukung pembuktian namun pada kenyataannya hampir semua kasus melibatkan saksi dalam pembuktian di pengadilan. Untuk di Indonesia sendiri penegakan hukum pidana pembuktiannya menganut sistem *negatif wettelijke* (sistem pembuktian negatif) di mana menempatkan keterangan saksi pada urutan pertama.<sup>14</sup> Namun pelaku berusaha sebisa mungkin perbuatannya tidak diketahui oleh siapapun sehingga Penyidik sulit mencari seorang yang dapat dijadikan saksi.

*Kedua*, alat bukti merupakan unsur terpenting untuk pembuktian di persidangan nanti, akan tetapi, pada kenyataannya dengan adanya alat bukti saja jika tidak dapat menemukan siapa Tersangkanya maka Penyidik tidak dapat melakukan Penyidikan.

## 4. PENUTUP

*Pertama*, penyidik setelah mendapat laporan lalu Penyidik dan Penyelidik mendatangi TKP kemudian mayat bayi diserahkan ke bagian Kedokteran Forensik Rumah Sakit terdekat untuk dimintakan Visum et Repertum. Setelah itu mencari pelaku dan alat bukti yang memenuhi selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaaan.

<sup>13</sup> Lihat Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, Hal. 50.

<sup>14</sup> Lihat Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 104 – 105.

*Kedua*, Jaksa Penuntut Umum dalam memproses perkara pembunuhan bayi oleh ibu kandung dilakukan sejak adanya SPDP dari kepolisian kemudian memeriksa berkas yang dilimpahkan dari kepolisian apabila telah lengkap kemudian dibuatkan surat dakwaan yang untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan.

*Ketiga*, hakim memutus berdasarkan pada apa yang dilihat dipersidangan. Melihat dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kemudian dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli Forensik, keterangan Terdakwa, barang bukti, Petunjuk, Surat hasil Visum et Repertum.

*Keempat*, penyidik dalam menangani perkara pembunuhan bayi oleh ibu kandung memiliki hambatan – hambatan sebagai berikut: *Pertama*, tidak ada orang yang dapat dijadikan saksi dalam kasus tersebut karena tidak ada yang melihat perbuatan itu dilakukan. *Kedua*, tidak ditemukannya siapa pelaku atau tersangkanya sehingga tidak mungkin perkara ini dapat diproses. Sedangkan bagi Penuntut Umum dan Hakim dalam menangani perkara ini tidak memiliki hambatan.

*Pertama*, bagi Aparat Penegak Hukum, lebih teliti dan jeli lagi dalam menggunakan Pasal yang akan diterapkan terhadap pelaku supaya sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku dan terwujud kepastian hukum dan lebih giat dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama perempuan agar tidak terjadi lagi kasus yang sama atau kasus yang lainnya.

*Kedua*, Bagi masyarakat, terutama bagi perempuan harus bisa menjaga diri dan tidak mudah terpengaruh oleh rayuan laki – laki yang tidak bertanggungjawab karena penyesalan dan kerugian atas apa yang kita perbuat adalah diri kita sendiri bahkan keluarga menjadi ikut menanggung malu.

Karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

*Pertama*, Orang Tua Penulis yang telah bekerja keras membiayai kuliah, dukungan dan do'a yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis sehingga dapat memperoleh gelar kesarjanaan Strata-1 ini.

*Kedua*, Dandy Dwi Prabowo dan Devita Noer Fathdilah, adik-adik yang telah memberikan doa dan semangat kepada Penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zaenal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hari Sasongko & Tjuk Suharjanto. 1988. *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Iksan, Muchamad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Suratman & H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Aurianti, Miske Rizki. 2015. “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Anak Di Pengadilan Negeri Bantul (Studi Kasus Perkara Nomor 223/PID.B/2014/PN.BTL)*” (online). <http://e-journal.uaip.ac.id/9069/1/JURNALHK10991.pdf>. diunduh pada 23 september 2016. pukul 17: 11 WIB
- Suaramerdeka. Selasa 27 September 2016: *Bayi Dibunuh Lalu Disembunyikan Di Monoblok Kloset* (online). <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/bayi-dibunuh-lalu->

[disembunyikan-di-monoblok-kloset/](#). diunduh 23 september 2016. pukul 17:15 WIB.

Tribunsolo.com. Rabu 13 Juli 2016: *Mayat Bayi Di Tempat Pembuangan Sampah Pajang. Solo. Ini Gegerkan Warga (online)*. <http://solo.tribunnews.com/2016/07/13/mayat-bayi-di-tempat-pembuangan-sampah-pajang-solo-ini-gegerkan-warga>. diunduh 23 September 2016. pukul 17:11 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan oleh R. Soesilo

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.